



Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis

Paisal Topan Nugraha¹, Asep Nurwanda², Agus Nurulsyam Suparman³

¹⁻³Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Jl. R. E. Martadinata No. 150 Ciamis, 46211

*Penulis Korespondensi: Paisal_topan_nugraha@student.unigal.ac.id

Abstract. *This study is motivated by the suboptimal role of the Village Government in developing the tourism village potential in Bangunharja Village, Cisaga District, Ciamis Regency. This issue is evident from the uneven dissemination of tourism village policies, suboptimal coordination with stakeholders, inconsistent community participation, limited facilities and infrastructure, uneven human resource capacity building, and suboptimal provision and management of tourism village information. The study aims to examine the Village Government's role in developing tourism village potential in Bangunharja Village, the obstacles encountered, and the efforts made to overcome them. A descriptive method with a qualitative approach was employed. Seven informants participated in the study, comprising the Village Head, the Village Consultative Body, the Head of the Government Affairs Section, the Head of the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), the Head of the Youth Organization (Karang Taruna), the Head of the Community Empowerment Institution, and community members. Data collection involved observation, interviews, and documentation, while data analysis utilized the Miles, Huberman, and Saldana model, encompassing data condensation, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the Village Government's role in developing tourism village potential in Bangunharja Village has not yet functioned optimally. Regarding the role of mediator, the village government has conducted outreach, coordinated activities, and encouraged community participation; however, these efforts are hindered by uneven information dissemination and low involvement among some community members. Regarding the role of facilitator, the village government has undertaken human resource capacity building, provided facilities and infrastructure, and managed tourism village data. Nevertheless, implementation is constrained by budget limitations, uneven training distribution, inadequate facilities, and suboptimal public information management. Efforts undertaken include increasing outreach, strengthening coordination, expanding cooperation with various parties, conducting training, developing facilities and infrastructure in stages, and optimizing the management of tourism village data and information.*

Keywords: Village Government Role, Tourism Village, Tourism Village Potential Development.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata di Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Permasalahan tersebut terlihat dari belum meratanya sosialisasi kebijakan desa wisata, koordinasi dengan pemangku kepentingan yang belum maksimal, partisipasi masyarakat yang belum konsisten, keterbatasan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, serta penyediaan dan pengelolaan informasi desa wisata yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata di Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri atas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kasi Pemerintahan, Ketua Pokdarwis, Ketua Karang Taruna, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata di Desa Bangunharja belum berjalan secara optimal. Pada dimensi peran sebagai mediator, pemerintah desa telah melaksanakan sosialisasi, koordinasi, dan mendorong partisipasi masyarakat, namun masih terkendala oleh belum meratanya penyampaian informasi dan rendahnya keterlibatan sebagian

masyarakat. Pada dimensi peran sebagai fasilitator, pemerintah desa telah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menyediakan sarana dan prasarana, serta melakukan pengelolaan data desa wisata. Namun, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran, belum meratanya pelatihan, fasilitas yang belum memadai, serta belum optimalnya pengelolaan informasi publik. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan sosialisasi, memperkuat koordinasi, memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, melaksanakan pelatihan, mengembangkan sarana dan prasarana secara bertahap, serta mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi desa wisata.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Desa Wisata, Pengembangan Potensi Desa Wisata.

1. LATAR BELAKANG

Pengembangan pariwisata yang berbasis desa bukan hanya merupakan suatu strategi sektor tetapi juga sebuah langkah dalam memberdayakan masyarakat dan memajukan desa secara partisipatif berdasarkan potensi lokal. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui berbagai pedoman dan peraturan memperkuat struktur operasional untuk pengembangan desa wisata. Contohnya, pedoman “Pedoman Desa Wisata” yang menegaskan bahwa desa wisata perlu menggabungkan elemen atraksi, akomodasi, fasilitas, serta kehidupan masyarakat lokal, dan harus dikembangkan secara komprehensif, bertahap, serta berkelanjutan.

Di samping itu, peraturan seperti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di bidang pariwisata menunjukkan bahwa pemerintah pusat juga mendukung pengembangan infrastruktur pariwisata hingga ke tingkat desa. Akibatnya, di tingkat daerah dan desa muncul peraturan-peraturan yang mendukung yang khusus untuk “desa wisata” dan “pariwisata desa”. Sebagai contoh, beberapa kabupaten telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati terkait Desa Wisata yang berfungsi sebagai alat pengembangan, koordinasi, dan pendanaan untuk kemajuan desa wisata. Pemerintah daerah Ciamis sangat serius dengan rencana nasional ini, sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan seperti Peraturan Daerah Ciamis Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kepariwisata dan Usaha Pariwisata, dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 tentang Desa Wisata. Peraturan-peraturan ini menunjukkan betapa pentingnya Pemerintah Desa dalam memimpin pengembangan pariwisata di daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 tentang Desa wisata bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam.

Pada Pasal 3 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan untuk:

- a. Desa Wisata dinyatakan bahwa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki
- b. Menjamin pengelolaan potensi wisata dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal;
- c. Memberdayakan masyarakat secara partisipatif untuk meningkatkan
- d. Kesejahteraan masyarakat; dan
- e. Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Desa Bangunharja, di Kecamatan Cisaga, Ciamis, dikenal sebagai desa dengan kekhasan alam dan budaya yang menonjol di wilayah Priangan Timur. Beberapa potensi destinasi wisata berdasarkan Peraturan Desa Bangunharja no 04 tahun 2020 tentang desa wisata pasal 17 ayat 1, diantaranya adalah sebagai berikut:

Table 1 Destinasi Wisata Desa Bangunharja

No	Nama Destinasi Wisata Desa Bangunharja
1	Pengelolaan Rest Area
2	Pengelolaan Curug Cicapar
3	Pengelolaan Puncak Manik
4	Pengelolaan Hutan Alam Sekunder/HAS dan Hutan Produksi
5	Pengelolaan Sungai Cijolang dan Sungai Cihonje
6	Pengelolaan Area Pertanian dan Perikanan
7	Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat
8	Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat
9	Pengelolaan Objek Ziarah
10	Pengelolaan Sanggar Budaya dan Kerajinan Lokal
11	Pengelolaan Objek Ziarah
12	Pengelolaan Jenis Usaha Daya Tarik Lainnya

Sumber: Peraturan Desa Bangunharja no 04 tahun 2020 tentang desa wisata pasal 17 ayat 1

Dalam pengembangan desa wisata, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting sebagai lembaga yang berfungsi dalam legislasi, pengawasan, serta

penyaluran aspirasi masyarakat. Namun, peran pemerintah desa dan BPD sebagai mediator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi lingkungan dan pelestarian budaya lokal di Desa Bangunharja masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan budaya yang justru menjadi daya tarik utama desa wisata. Kondisi tersebut menunjukkan belum efektifnya fungsi mediasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mendorong partisipasi dan kesadaran kolektif, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan ditemukan permasalahan bahwa peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa wisata di desa bangunharja belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran pemerintah desa sebagai mediator dalam mensosialisasikan regulasi khususnya peraturan desa tentang desa wisata di desa bangunharja kecamatan cisaga kabupaten ciamis.
2. Belum optimalnya peran pemerintah desa dan pengelola wisata sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata khususnya dalam hal manajemen pariwisata, pelayanan wisatawan, dan pemasaran digital.
3. Belum optimalnya peran pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai mediator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi lingkungan dan budaya lokal yang justru menjadi daya tarik utama desa wisata.
4. Belum optimalnya peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam menyediakan dan mengelola data jumlah pengunjung Desa Wisata Bangunharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis sebagai informasi publik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut guna menganalisis secara mendalam bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa wisata di Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

2. KAJIAN TEORITIS

Peran menurut E.St.Harahap,dkk, 2007:854 “Makna peran yang dijelaskan dalam status kedudukan dan peran masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa cara yaitu: penjelasan historis, Menurut penjelasan historis konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi”.

Lain hal nya menurut Dahl Robert A. (dalam Arafat, A, 2023:11) menyebutkan bahwa peran pemerintah dibagi menjadi dua diantaranya:

1. Peran sebagai mediator, peran sebagai mediator antara berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat.
2. Peran sebagai fasilitator, peran sebagai fasilitator yang mencoba menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dan mencapai konsensus dalam pembuatan kebijakan publik

Pemerintah ideal harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan publik melalui mekanisme mediasi dan fasilitasi yang efektif. Dari berbagai pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peran berarti laku atau bertindak, merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh individu sesuai dengan kedudukan sosial mereka dalam masyarakat. Kemudian, Glen Elder dalam (Zaubaidah & Risnawati, 2016: 115) membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan “*life-course*” memaknakan bahwa “setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori tertentu di dalam masyarakat, baik berdasarkan usia atau hal lain yang berlaku dalam masyarakat tersebut”.

Masing-masing peran menghendaki perilaku yang berbeda-beda, antara satu dengan yang lain (Agustina, 2009: 42). Maka, dalam praktinya, peran merupakan hal yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Menurut Biddle & Thomas dalam Hidayaturrehman, M., *et al.* (2020:44) “teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut pertama, orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, kedua, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, ketiga, kedudukan orang-orang dalam perilaku, keempat, kaitan antara orang dan perilaku (harapan)”.

Peran menurut Yeti (2014:24) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran aktor publik yang dapat dipahami sebagai berikut:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan besar. Sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat mempermudah pemerintah untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Ketersediaan anggaran Dari lingkup pemerintah mana pun, baik pusat maupun daerah, semuanya memerlukan akses finansial yang memadai dalam menjalankan perannya selaku pelayanan masyarakat. Anggaran menjadi penting karena sumber finansial dari pemerintah juga merupakan alat yang dapat menjadi motivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi.
3. Kemitraan Prinsip good governace yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pola hubungan ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk kemitraan agar dapat terjalin dengan baik.
4. Partisipasi dari masyarakat Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat merupakan sorotan utama, karena masyarakat berada pada posisi subyek dan objek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa keempat faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi pada efektivitas peran aktor publik dalam mencapai tujuan pembangunan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan pemerintah desa sebagai kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa berada dalam sistem pemerintahan daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota, namun tetap memiliki otonomi tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan demikian, desa tidak lagi sekadar objek pembangunan, tetapi diakui sebagai subjek yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam tata kelola pemerintahan serta pembangunan berbasis komunitas.

Menurut H.A.W. Widjaja (2009:3) menyatakan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, di mana kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur, melaksanakan urusan, dan memberdayakan masyarakat desa sesuai sistem pemerintahan Indonesia.

Menurut Nurwanda, A., & Badriah, E. (2020) Desa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, Namun kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan didasari masih memiliki keterbatasan Pengembangan pariwisata pedesaan merupakan dampak dari adanya perubahan minat wisatawan akan tujuan wisata yang bervariasi. secara lebih komprehensif menjabarkan desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya (Chafid Fandeli, 2002). Dengan kata lain desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup berperan dan berkontribusi dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (Nurwanda, A, 2020). Konsepsi mengembangkan desa wisata dapat dimulai dari daya tarik wisata desa dan lingkungannya. Pariwisata saat ini telah menjadi kebutuhan pokok sebagian besar manusia. Pariwisata telah menjadi ikon dari hampir seluruh wilayah pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat (Nurwanda, A., Badriah, E., & Nursetiawan, I, 2020). Dengan adanya objek wisata, maka hal itu dapat membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi wisata sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk lebih mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dengan menawarkan jasa dan menjual

barangbarang yang terbuat dari banyak potensi desa (Putra, A. F. P., Nurwanda, A., & Endah, K, 2025).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata desa memiliki ragam bentuk yang berakar pada potensi lokal, baik alam, budaya, maupun aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga mampu menjadi daya tarik wisata sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata menjadi kunci untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan keberlanjutan pariwisata (Al-Ghani, N. S. S., Nurwanda, A., & Endah, K, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi Desa Wisata di Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Bangunharja, Badan Permusyawaratan Desa, Kasi Pemerintahan, Pokdarwis, Ketua Karang Taruna, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta triangulasi sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Analisis data dilakukan melalui tahapan persiapan dan reduksi data, penyajian data, pengkodean dan pembentukan tema, pengambilan kesimpulan dan validasi, serta pelaporan hasil dengan narasi dan ilustrasi empiris. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik sehingga hasil penelitian yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh indikator dalam setiap dimensi belum berjalan secara optimal. Adapun indikator-indikator yang belum optimal dalam setiap dimensi diantaranya sebagai berikut:

1. Dimensi Peran Sebagai Mediator, indikator yang belum optimal meliputi:
 - a. Adanya sosialisasi regulasi dan kebijakan desa wisata kepada masyarakat, karena penyebaran informasi belum menjangkau seluruh masyarakat, tingkat

kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosialisasi masih rendah, serta pemahaman masyarakat terhadap kebijakan desa wisata masih berbeda-beda.

- b. Adanya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan desa wisata, karena belum seluruh pemangku kepentingan terlibat secara optimal dalam proses perencanaan, adanya kendala penyesuaian waktu pertemuan, serta penyampaian hasil koordinasi kepada masyarakat masih terbatas.
- c. Adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan budaya lokal, karena masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap pengelolaan desa wisata merupakan tanggung jawab pemerintah desa dan Pokdarwis, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian belum berlangsung secara konsisten.

2. Dimensi Peran Sebagai Fasilitator, indikator yang belum optimal meliputi:

- a. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, karena pelaksanaan pelatihan masih terbatas, belum menjangkau seluruh masyarakat, serta masih terbatasnya anggaran dan sumber daya dalam penyelenggaraan pelatihan.
- b. Adanya penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung desa wisata, karena masih terdapat beberapa fasilitas yang belum memadai, pembangunan dilakukan secara bertahap akibat keterbatasan anggaran, serta masih diperlukan dukungan dari pemerintah maupun stakeholder lainnya.
- c. Adanya penyediaan dan pengelolaan data serta informasi desa wisata sebagai informasi publik, karena sistem pendataan belum tertata secara optimal, belum tersedia media informasi yang diperbarui secara berkala, serta masyarakat masih kesulitan memperoleh informasi mengenai jumlah pengunjung dan perkembangan desa wisata.

Pada dimensi Peran Sebagai Mediator, Pemerintah Desa Bangunharja telah melaksanakan sosialisasi kebijakan desa wisata, menjalin koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan maksimal karena masih terdapat keterbatasan dalam pemerataan penyampaian

informasi, koordinasi yang belum sepenuhnya melibatkan seluruh pihak, serta partisipasi masyarakat yang belum merata dan berkelanjutan.

Pada dimensi Peran Sebagai Fasilitator, Pemerintah Desa Bangunharja telah berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, menyediakan sarana dan prasarana pendukung desa wisata, serta melakukan pendataan dan pengelolaan informasi desa wisata. Akan tetapi, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai hambatan berupa keterbatasan anggaran, belum meratanya kesempatan masyarakat dalam mengikuti pelatihan, masih adanya fasilitas yang perlu dilengkapi, serta belum optimalnya pengelolaan dan publikasi data maupun informasi desa wisata kepada masyarakat.

Dengan demikian, Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata di Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam aspek sosialisasi, koordinasi, partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan data dan informasi desa wisata agar pengembangan potensi Desa Wisata Bangunharja dapat terlaksana secara lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata di Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis belum berjalan secara optimal, meskipun pemerintah desa telah melaksanakan berbagai upaya dalam mendukung pengembangan desa wisata. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan peran pemerintah sebagai mediator dan fasilitator yang telah berjalan, namun masih terdapat beberapa kendala pada setiap dimensi sehingga pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini sejalan dengan proposisi penelitian yang menyatakan bahwa peran pemerintah akan berjalan optimal apabila fungsi mediator dan fasilitator dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan di antaranya pada dimensi peran sebagai mediator masih terdapat penyebaran informasi mengenai kebijakan desa wisata yang belum merata kepada seluruh masyarakat, koordinasi dan komunikasi yang belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara optimal, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan budaya lokal yang belum konsisten. Sementara itu, pada dimensi peran sebagai fasilitator masih terdapat keterbatasan anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung desa wisata, pelaksanaan pelatihan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, serta penyediaan dan pengelolaan data maupun informasi desa wisata yang belum optimal sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh informasi mengenai perkembangan Desa Wisata Bangunharja sebagai informasi publik.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunharja dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut di antaranya melalui pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi secara berkelanjutan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, peningkatan pembinaan serta pelatihan sumber daya manusia di bidang pariwisata, pembangunan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai kemampuan anggaran, menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya, serta memperbaiki sistem pendataan dan pengelolaan informasi desa wisata melalui dokumentasi yang lebih tertib dan pemanfaatan media informasi agar dapat diakses oleh masyarakat dan wisatawan.

DAFTAR REFERENSI

Sumber Buku :

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Adi, R. (2012). *Sosiologi untuk Pembangunan: Kajian Proses Sosial dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arafat, A. (2023). *Kebijakan publik: Teori dan praktik*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Fandeli, Chafid. (2002). *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Bulaksusmur, Yogyakarta.
- Harahap, dkk. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Hidayaturrahman, M., Moerod, M., Laily, N., Wisman, Y., Goa, L., Derung, T. N., Sugiantiningsih, A. A. P., Yahya, H. M., Agusrianto, E., & Handayani, E. (2020). *Teori sosial empirik: Untuk penelitian ilmiah (skripsi, tesis dan disertasi)*. Edulitera.
- Margayaningsih, Dwi Iriani. (2018). *Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa*, Jakarta: Publiciana.
- Mulyati, T., Susilo, H., Rohmatiah, A., & Haryani, A. T. (2022). *Membangun desa wisata: Sinergi antara potensi & pemberdayaan*. Penerbit Lakeisha.
- Ndraha, Taliziduhu. (2010). *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Silalahi, Ulber. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Siswanto, Thoha (2020). *Kepemimpinan dalam manajemen*. PT. Rajagrafindo Persada, Kota Depok.
- Soekanto, Soejono (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up.
- Widjaja, H.A.W (2009). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zubaidah & Risnawati (2016). *Psikologi Pembelajaran Matematika*. Yogyakarta: PT Plosokuning.

Sumber Jurnal dan Skripsi:

- Agustina, Lidya (2009). Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor. Penelitian Kantor Akuntan Publik yang Bermitra Dengan Kantor Akuntan Publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta. *Universitas Kristen Maranatha*. Vol. 1 No. 1, hal. 40-69.
- Alfianto, F. Y. (2021). Peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Pakuncen. *Paradigma*, 10(1).
- Al-Ghani, N. S. S., Nurwanda, A., & Endah, K. (2025). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA JOJOGAN DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(5), 827-833.

- Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M. (2022). Peran Pemerintah desa Purworejo dalam pengembangan wisata alam sumber complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(3), 291-303.
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). Metodologi penelitian pendidikan: Prosedur penelitian, subyek penelitian, dan pengembangan teknik pengumpulan data (Cetakan pertama). UMSIDA Press.
- Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2019). Identifikasi potensi desa wisata di Kabupaten Ciamis berbasis community based tourism. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 339–348. *Universitas Galuh*.
- Nurwanda, A. (2020). Analisis Potensi Agrowisata Di Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 485-489.
- Nurwanda, A., & Badriah, E. (2020). Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 68-75.
- Nurwanda, A., Badriah, E., & Nursetiawan, I. (2020). Memahami Kebijakan Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Ciamis: Dinamika Sumber Daya Alam Lokal Dan Kebudayaan. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 136-149.
- Putra, A. F. P., Nurwanda, A., & Endah, K. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Sedekan River Tubing Sungai Cileueur di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(5), 869-878.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Yeti, Yudiyanti. (2014). Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Skripsi, (Sommunity Based Tourism)*.
- Syaifudin, M. Y. 2022. Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata (Studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dokumen, Website, & Peraturan :

- Berita Lokal. (2025). Tradisi dan potensi wisata budaya Desa Bangunharja. Ciamis: Media Lokal Jawa Barat.
- Desa Bangunharja. (2024). Profil dan potensi Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Pemerintah Desa Bangunharja.
- Insiden24. (2025, Mei 18). Potensi wisata Desa Bangunharja Ciamis: Pesona alam, budaya, dan kuliner khas yang memikat.
- Jadesta Kemenpar. (2024). Data Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Kemenparekraf. (2021). Panduan pengembangan desa wisata berkelanjutan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021, Mei 4). Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021: Desa Wisata cerminan harapan akan kebangkitan parekraf pascapandemi.

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata. Lintas Priangan. (2025). Fun tubing dan daya tarik wisata alam Desa Bangunharja. Media Online Priangan Timur.
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 tentang Desa Wisata.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kepariwisata dan Usaha Pariwisata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 sampai 2025
- Suryana, H. (2023). Laporan observasi obyek wisata dan situs bersejarah di wilayah sekitar Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga. Scribd.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa